



# **PENERAPAN TEORI KEKUASAAN MACHIAVELLI DALAM SISTEM PERPOLITIKAN DI INDONESIA**

## **SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi -  
Filsafat Agama Katolik**

**Oleh**

**MATHIAS BANUSU**

**NPM: 17. 75. 6170**

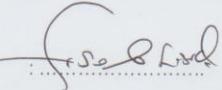
**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2021**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

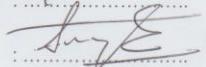
1. Nama : Mathias Banusu
2. NPM : 17.75.6170
3. Judul : Penerapan Teori Kekuasaan Machiavelli dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia

### 4. Pembimbing:

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic. 

(Penanggung Jawab)

2. Hendrikus Maku, S. Fil., M.Th., Lic. 

3. Yohanes Orong, S. Fil., M. Pd. 

5. Tanggal diterima : 15 Juni 2020

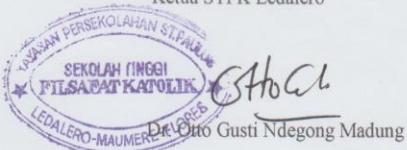
6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero

Yosef  
Dr. Yosef Keladu



Dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada

24 Mei 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



DEWAN PENGUJI

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic.
2. Hendrikus Maku, S. Fil., M. Th., Lic
3. Yohanes Orong, S. Fil., M. Pd.

Three handwritten signatures are shown vertically next to the list of examiners. From top to bottom, they appear to be: 1. Ferdinandus Sebo, 2. Hendrikus Maku, and 3. Yohanes Orong.

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathias Banusu

NPM : 17.75.6170

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 24 Mei 2021

Yang menyatakan,



Mathias Banusu

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathias Banusu

NPM : 17.75.6170

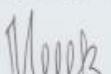
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **Penerapan Teori Kekuasaan Machiavelli dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 24 Mei 2021

Yang menyatakan

  
Mathias Banusu

## KATA PENGANTAR

Kekuasaan merupakan salah satu tema fundamen yang dibicarakan dalam kajian ilmu politik. Kekuasaan selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan secara holistik. Pasalnya, kekuasaan kerap kali menampilkan dua sisi yang kontradiksi. Pada sisi positif, kekuasaan merupakan landasan fundamen dan memiliki dasar legitimasi. Kekuasaan ini digunakan oleh penguasa sebagai medium dalam mengatur, menjalankan serta mengimplementasikan pelbagai kebijakan publik yang bermuara pada kondisi kesejahteraan bersama. Pada sisi negatif, kekuasaan dinilai sarat dengan taktik manipulatif, tipu daya serta tindakan menghalalkan segala cara yang bertujuan untuk pengukuhan kedudukan dan kepentingan si penguasa

Adalah Machiavelli, seorang filsuf politik asal Italia yang secara gamblang mengkonstruksi teori kekuasaannya berdasarkan realitas yang terjadi pada masa itu. Florence yang berada dalam situasi *chaos*, mengalami krisis dalam pelbagai bidang kehidupan, terutama bidang politik dan tata negara. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh intervensi gereja terhadap urusan negara yang begitu kuat. Realitas ini menyebabkan Italia mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa asing dan terpecah-pecah menjadi negara bagian. Dalam kondisi seperti ini, sosok Machiavelli hadir dan memberikan tindakan solutif dalam rangka mempersatukan kembali negara Italia. Alternatif yang ditawarkannya adalah kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh seorang penguasa secara keras dan tegas. Seorang penguasa boleh bertindak apa saja, asalkan bertujuan untuk mengintegrasikan negara. Baginya, tindakan seorang penguasa tidak boleh dikaitkan dengan etika dan moral. Dalam situasi yang terdesak, etika dan moral hanyalah sesuatu yang bersifat ideal, ketimbang realitas yang sedang terjadi.

Dalam sejarah perjalanan hidup selanjutnya, teori kekuasaan Machiavelli diadopsi dan dipraktikan oleh sebagian besar penguasa di seluruh dunia terutama

di Indonesia. Para penguasa yang dipercayakan untuk mengemban tugas dan pelayanan terhadap masyarakat, cenderung mempraktikkan doktrin Machiavellianisme. Misalnya, tindakan korupsi, politik dinasti dan politik uang (*money politic*) secara umum dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan-tindakan itu disebut sebagai tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh penguasa. Sejatinya, tindakan korupsi, dinasti politik dan politik uang dinilai tidak etis dan menyimpang dari substansi demokrasi.

Penerapan teori kekuasaan Machiavelli dalam sistem perpolitikan di Indonesia, sudah pasti menyimpang dari sistem demokrasi. Karena itu, penolakan terhadap teori kekuasaan Machiavelli merupakan suatu keharusan. Sayangnya, sadar ataupun tidak, para penguasa telah menerima dan mempraktikkan teori kekuasaan Machiavelli secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Bertolak dari uraian di atas, penulis berasumsi bahwa praktik-praktik politik yang menganut paham Machiavellianisme harus dilawan dan ditolak secara tegas. Dalam karya ilmiah ini, penulis menawarkan suatu sistem politik demokrasi bermartabat sebagai antitesis terhadap beberapa fenomena yang terjadi dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Di samping itu, penulis mengajak seluruh elemen masyarakat terutama para penguasa dan elite politik untuk tidak mempraktikkan gagasan kekuasaan Machiavelli dalam kehidupan bersama. Penerapan teori kekuasaan Machiavelli hanya mendatangkan petaka bagi demokrasi. Teori kekuasaan Machiavelli menghalangi proses aktualisasi demokrasi yang bermartabat.

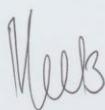
Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis tidak bekerja sendrian. Banyak pihak yang memberikan dukungan moril maupun finansial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih. *Pertama*, syukur dan terima kasih yang berlimpah kepada Tuhan Yang Mahakasih, yang telah menganugerahkan rahmat kebijaksanaan-Nya atas penulis, sehingga boleh menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing, Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic., yang dengan sabar membimbing penulis dalam proses penulisan dan penyelesaian karya ilmiah

ini. *Ketiga*, kepada dosen penguji, Hendrikus Maku, S. Fil., M.Th, Lic., yang dengan caranya membantu penulis untuk memperkaya karya ilmiah ini. Penulis

menghaturkan terima kasih. *Keempat*, limpah terima kasih penulis sampaikan untuk Sr. Florida dan Fr. Silvester Leo yang senantiasa menjadi teman diskusi dan mendorong penulis untuk lebih berkonsentrasi dalam mendalami gagasan-gagasan Machiavelli. *Kelima*, terima kasih yang berlimpah penulis haturkan kepada komunitas Seminari Tinggi Ledalero dan secara khusus segenap penghuni wisma Rafael yang telah memberikan dukungan kepada penulis terutama menciptakan situasi yang kondusif, sehingga penulis bisa berkonsentrasi dalam menulis dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih juga untuk teman-teman seangkatan wisam Rafael yang senantiasa memotivasi penulis terutama saat rasa malas menghampiri penulis. *Keenam*, penulis juga menyampaikan terima kasih yang begitu dalam kepada kedua orang tua tercinta, bapa Donatus Banusu dan mama Petronela Bani, adik Skolastika Banusu yang senantiasa memberikan cinta dan dukungan yang besar bagi penulis. Doa dan dukungan mereka menjadi kekuatan bagi penulis untuk tetap setia dalam panggilan dan menyelesaikan karya ilmiah ini pada waktunya. Terima kasih untuk semua saudara, adik, kakak, sahabat dan kenalan di mana saja mereka berada yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Sebab itu, segala bentuk masukan dan kritikan konstruktif, apapun bentuknya, dari para pembaca, penulis dengan hati dan pikiran terbuka menerima itu sebagai bentuk penyempuranaan terhadap karya ini.

Ledalero, 7 Mei 2021



Penulis

## ABSTRAK

Mathias Banusu, 17.75.6170. *Penerapan Teori Kekuasaan Machiavelli dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Skripsi Program Sarjana, Program studi Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan gagasan teori kekuasaan Machiavelli, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan penerapannya dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif.

Penulis meneliti teori kekuasaan Machiavelli dalam buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berbicara tentangnya sambil menganalisis secara deskriptif. Teori kekuasaan Machiavelli lahir dari suatu realitas sosial-politik yang terjadi di Florence, Italia. Situasi Florence yang berada di ambang kehancuran, mendorong Machiavelli menawarkan gagasan kekuasaan yang mesti dijalankan dan dikendalikan oleh seorang penguasa tunggal. Dalam rangka mempersatukan kembali negara Italia yang terfragmentasi menjadi negara-negara bagian, seorang penguasa boleh berbuat apa saja tanpa harus mempertimbangkan nilai etika, moral serta baik-buruknya tindakan tersebut. Di sini, penguasa juga bertindak secara otoriter, represif serta mengabaikan peran dan keterlibatan rakyat di dalamnya. Rakyat hanya diperlukan sejauh mendukung seluruh rencana dan tindakan sang penguasa.

Teori kekuasaan Machiavelli dianggap menyimpang dari substansi etika dan moralitas. Tindakan menghalalkan segala cara (Machiavellianisme) dalam situasi apapun dinilai tidak efektif. Penerapan doktrin Machiavellianisme, berpotensi melahirkan persoalan-persoalan baru dalam masyarakat. Apalagi, penerapan teori kekuasaan ini direalisasikan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, selalu dan senantiasa menghormati dan mengakui hak-hak politis rakyatnya. Selalu ada ruang yang bebas bagi rakyat untuk berekspresi dan menyampaikan suara kritisnya. Kendati demikian, tidak dapat dimungkiri lagi bahwa doktrin Machiavellianisme telah diadopsi dan dipraktikan oleh sebagian besar penguasa dan para elite politik di Indonesia.

Tindakan korupsi, dinasti politik dan politik uang menjadi rujukan fundamen bahwa realitas perpolitikan Indonesia sudah dan sedang menerapkan teori kekuasaan Machiavelli. Kasus korupsi menandai adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh sang penguasa untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Dinasti politik dipraktikan dengan motivasi dasar agar kekuasaan dijalankan oleh segelintir orang yang masih memiliki hubungan darah. Sedangkan, politik uang merupakan praktik politik kotor yang dijalankan oleh seorang calon pejabat publik guna memperoleh kemenangan saat pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi bahwa sadar atau tidak, penerapan teori kekuasaan Machiavelli sejauh ini sangat relevan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Karena itu, sebuah tawaran dari penulis, dalam rangka mengatasi pelbagai persoalan politik yang menerapkan doktrin Machiavellianisme urgent untuk diperjuangkan. Tawaran yang dimaksudkan penulis adalah demokrasi bermartabat sebagai upaya mengatasi problematika politik di Indonesia.

**Kata kunci:** Teori kekuasaan Machiavelli, korupsi, politik dinasti, politik uang dan demokrasi bermartabat.

## ABSTRACT

Mathias Banusu, 17.75.6170. **Application of Machiavelli's Theory of Power in the Political System in Indonesia.** Essay. Undergraduate Program. Catholic Philosophy Study Program, The Catholic Institute of Philosophy Ledalero, 2021.

The purpose of writing this scientific paper to (1) describe and explain the ideas of Machiavelli's theory of power, and to (2) describe and explain its application in the political system in Indonesia. The research method in this writing is qualitative research with descriptive analysis method. The author examines Machiavelli's theory of power in books, journals and articles that talk about him while analyzing descriptively. Machiavelli's theory of power was born from a socio-political reality that occurred in Florence, Italy. Florence's situation, which was on the verge of collapse, prompted Machiavelli to offer the idea of power that a single ruler should carry out. In order to reunite the fragmented Italian state into states, a ruler can do anything without considering the pros and cons. Here, the authorities also act in an authoritarian, repressive manner and ignore the role and involvement of the people in it. The people are needed to support all the plans and actions of the ruler.

Machiavelli's theory of power is considered to deviate from the substance of ethics and morality. The act of justifying all means (Machiavellianism) in any situation is considered ineffective. The application of the Machiavellian doctrine has the potential to create new problems in society. Moreover, the application of this theory of power is realized in the political system in Indonesia. Indonesia as a country that applies a democratic government system, always respects and recognizes the political rights of its people. There is always a free space for the people to express themselves and convey their critical voices.

However, it cannot be denied that the doctrine of Machiavellianism has been adopted and practiced by most of the Indonesian rulers and political elites. Actions of corruption, political dynasties and money politics are fundamental references that the reality of Indonesian politics has been and is implementing Machiavelli's theory of power. Corruption cases indicate the practice of abuse of power by the ruler for the fulfillment of personal interests. Political dynasties are practiced with a basic motivation for power to be exercised by a handful of people who are blood-related. Meanwhile, money politics is a dirty political practice that is carried out by a candidate for public office in order to win during the election.

Based on the description above, the writer assumes that consciously or not, the application of Machiavelli's theory of power so far is very relevant in the political system in Indonesia. Therefore, an offer from the author, in order to overcome political problems that apply the Machiavellian doctrine, is urgent to be fought for. The offer the author means is a democracy with dignity as an effort to solve political problems in Indonesia.

**Keywords:** **Machiavelli's theory of power, corruption, political dynasties, money politics and a dignified democracy.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARANJUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARANPENERIMAANJUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARANPENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAANORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUKKEPENTINGANAKADEMISI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Penulisan.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Metode Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II PROFIL NICCOLO MACHIAVELLI.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 PENGANTAR.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Riwayat Hidup Niccolo Machiavelli (1469-1527).....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Karya-karya Niccolo Machiavelli.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3.1 <i>Il Principe</i> (1513).....</b>	<b>17</b>
<b>2.3.2 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1512-1517).....</b>	<b>20</b>
<b>2.4 Latar Belakang dan Pengaruh Utama Bagi Pemikiran Machiavelli.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4.1 Latar Belakang Pemikiran Machiavelli.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4.2 Pengaruh Utama terhadap Pemikiran Machiavelli.....</b>	<b>27</b>
<b>2.4.2.1 Plato.....</b>	<b>28</b>
<b>2.4.2.2 Aristoteles.....</b>	<b>30</b>
<b>2.4.2.3 Cesare Borgia.....</b>	<b>32</b>

<b>2.5 Kesimpulan.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III TEORI KEKUASAAN MACHIAVELLI DAN KRITIK ATASNYA.....</b>	
<b>3.1 Pengantar.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2 Pemikiran Machiavelli tentang Negara.....</b>	<b>37</b>
3.2.1 Negara Mesti Memiliki Hukum.....	39
3.2.2 Negara Mesti Memiliki Tentara yang Baik.....	40
<b>3.3 Politik Machiavelli: Politik tanpa Moralitas.....</b>	<b>42</b>
<b>3.4 Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan.....</b>	<b>47</b>
<b>3.5 Pragmatisme Agama dan Moralitas.....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Catatan Kritis atas Teori Kekuasaan Machiavelli.....</b>	<b>52</b>
3.6.1 Politik Kekuasaan Machiavelli: Sebuah Persoalan Etis-Moral.....	52
3.6.2 Politik Kekuasaan Machiavelli Berorientasi pada Kepentingan Penguasa... <td>56</td>	56
3.6.3 Prinsip Menghalalkan Segala Cara sebagai Praksis Politik Amoral.....	59
3.6.4 Agama dan Moralitas Bukan Sebatas Alat Negara.....	61
<b>3.7 Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV PENERAPAN TEORI KEKUASAAN MACHIAVELLI DALAM SISTEM PERPOLITIKAN DI INDONESIA.....</b>	
<b>4.1 Pengantar.....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 Beberapa Fenomena yang Terjadi dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia.....</b>	<b>65</b>
4.2.1 Korupsi.....	65
4.2.2 Politik Dinasti.....	72
4.2.3 Politik Uang.....	75
<b>4.3 Penerapan Teori Kekuasaan Machiavelli Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia.....</b>	<b>79</b>
4.3.1 Korupsi sebagai Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Persoalan Etis-Moral.....	80
4.3.2 Politik Dinasti: Tantangan bagi Proses Perealisasian Demokratisasi, Orientasi bagi Kepentingan Penguasa dan Kematian Iklim Demokrasi.....	82

4.3.3 Politik Uang: Melahirkan Pemimpin yang Korup, Menghancurkan Tatanan Kehidupan Bersama dan Merendahkan Martabat Manusia.....	88
<b>4.4 Demokrasi Bermartabat: Sebuah Tawaran Mengatasi Problematika Politik di Indonesia.....</b>	<b>92</b>
<b>4.5 Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>96</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>